

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
Audited

Jl. Bulu No. 101 Lanrang, Kab. Sidenreng Rappang 91651

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lanrang, 08 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3. Basis Akuntansi	
A.4. Dasar Pengukuran	
A.5. Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	
B.1.1. Penerimaan Perpajakan	
B.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2. Belanja	
B.2.1. Belanja Pegawai	
B.2.2. Belanja Barang	
B.2.3. Belanja Modal	
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.2. Piutang Bukan Pajak	
C.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.6. Persediaan	
C.7. Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.9. Tanah	
C.10. Peralatan dan Mesin	
C.11. Gedung dan Bangunan	
C.12. Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.13. Aset Tetap Lainnya	

C.14. Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.15. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.16. Aset Tak Berwujud	
C.17. Aset Lain-lain	
C.18. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.19. Pendapatan Diterima Dimuka	
C.20. Ekuitas	
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2. Beban Pegawai	
D.3. Beban Persediaan	
D.4. Beban Barang dan Jasa	
D.5. Beban Pemeliharaan	
D.6. Beban Perjalanan Dinas	
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.9. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.10. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.11. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.12. Pos Luar Biasa	
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
E.1. Ekuitas Awal	
E.2. Surplus (Defisit) LO	
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5. Transaksi Antar Entitas	
E.6. Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lanrang, 08 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 248.162.690,00** atau mencapai **103,40** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp. 240.000.000,00**.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar **Rp. 4.459.140.690,00** atau mencapai **98,89** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.509.042.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset disajikan sebesar **Rp. 393.502.108.832,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 12.198.000,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp 0,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 392.873.764.572,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 616.146.260,00**.

Nilai Kewajiban sebesar **Rp 0,00** dan nilai Ekuitas sebesar **Rp 393.502.108.832,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 247.427.500,00**, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar **Rp 5,805,503,975,00** sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp 5.558.076.475,00)**. Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) sebesar **Rp 247.825.190,00** dan Pos Luar Biasa Surplus/(Defisit) sebesar **Rp 0,00** sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar **(Rp 5.310.251.285,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 695.391.713.336,00** ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar **(Rp 96.270.377.790,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp 296.889,00** dan

Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp90.135.253.038,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp689.256.885.473,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	0	0	-	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	240,000,000	248,162,690	103.40	317,015,487
JUMLAH PENDAPATAN		240,000,000	248,162,690	103.40	317,015,487
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1,698,672,000	1,698,274,129	99.98	1,163,858,410
Belanja Barang	B.2.2	2,810,370,000	2,760,866,561	98.24	2,997,098,895
Belanja Modal	B.2.3	0	0	-	83,700,000
JUMLAH BELANJA		4,509,042,000	4,459,140,690	98.89	4,244,657,305

Lanrang, 08 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

II. NERACA

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI
NERACA
PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

ASET TETAP			
Tanah	C.5	378,890,348,000	378,890,348,000
Peralatan dan Mesin	C.6	8,998,680,393	8,998,680,393
Gedung dan Bangunan	C.7	16,888,592,633	16,888,592,633
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8	3,191,500,857	3,191,500,857
Aset Tetap Lainnya	C.9	55,472,000	55,472,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(15,150,829,311)	(14,083,945,978)
Jumlah Aset Tetap		392,873,764,572	393,940,647,905
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.11	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.13	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.14	0	0
Aset Lain-Lain	C.15	937,975,000	937,975,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(321,828,740)	(283,610,788)
Jumlah Aset Lainnya		616,146,260	654,364,212
JUMLAH ASET		393,502,108,832	394,601,382,117
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.18	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.18	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	393,502,108,832	394,601,382,117
Jumlah Ekuitas		393,502,108,832	394,601,382,117
JUMLAH EKUITAS		393,502,108,832	394,601,382,117
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		393,502,108,832	394,601,382,117

Lanrang, 08 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	247,427,500	303,215,48
JUMLAH PENDAPATAN		247,427,500	303,215,48
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1,698,274,129	1,163,858,41
Beban Persediaan	D.3	300,829,500	150,486,50
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,816,916,145	1,985,177,88
Beban Pemeliharaan	D.5	264,522,000	456,512,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	372,770,916	402,345,01
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	247,090,000	303,469,40
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,105,101,285	1,213,921,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	
JUMLAH BEBAN		5,805,503,975	5,675,770,80
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,558,076,475)	(5,372,555,31)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset		0	
Beban Pelepasan Aset		0	
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		247,825,190	316,657,40
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		247,825,190	316,657,40
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,310,251,285)	(5,055,897,91)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	0	
POS LUAR BIASA		0	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.13	(5,310,251,285)	(5,055,897,91)

Lanrang, 08 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	394,601,382,117	395,729,026,4
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,310,251,285)	(5,055,897,5
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	
JUMLAH		0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4,210,978,000	3,928,253,8
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	E.4	(1,099,273,285)	(1,127,644,1
EKUITAS AKHIR	E.5	393,502,108,832	394,601,382,1

Lanrang, 08 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Suwarny Sumardi, S.P, M.Si
NIP 198311052005012001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi. Didirikan dengan semangat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, efisiensi produksi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global, BRMP hadir sebagai penggerak utama pertanian masa depan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan perakitan dan modernisasi pertanian. Entitas berkedudukan Jalan Bulu No. 101 Lanrang Kabupaten Sidenrang Rappang Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi LPP Tanaman Aneka Umbi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis LPP Tanaman Aneka Umbi Tahun 2021-2024 adalah:

Visi:

“Menjadi pusat unggulan nasional dalam perakitan, pengujian, dan modernisasi teknologi pertanian tanaman aneka umbi yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.”.

Misi:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian berbasis tanaman aneka umbi secara ilmiah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pasar.
2. Menyelenggarakan pengujian dan validasi teknologi serta benih sumber tanaman aneka umbi untuk menjamin mutu dan ketelusuran.
3. Mengembangkan dan memproduksi benih sumber unggul ubi kayu, ubi jalar, dan umbi potensial lainnya.
4. Menyusun dan mengembangkan standar nasional (SNI) serta sistem penilaian kesesuaian dalam bidang tanaman aneka umbi.
5. Mendukung modernisasi pertanian melalui integrasi teknologi dan pendampingan petani serta pelaku usaha.
6. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan diseminasi teknologi umbi-umbian.
7. Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan didukung sistem manajemen mutu dan SDM unggul.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu *SAKTI*. Aplikasi SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di *SAKTI* yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). *SAKTI* Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-2/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 pada Masa Transisi dan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : 331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel, Belanja Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel, serta Belanja Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptabel untuk mencatat pengadaan yang nilainya dibawah nilai Kapitalisasi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara p
- pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise</i> .	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	240,000,000	240,000,000
Jumlah Pendapatan	240,000,000	240,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	1,056,922,000	1,698,672,000
Belanja Barang	2,452,464,000	2,810,370,000
Belanja Modal	100,000,000	0
Jumlah Belanja	3,609,386,000	4,509,042,000

Pendapatan

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2025 adalah sebesar **Rp 248.162.690,00** atau mencapai 103,40% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 240.000.000,00**. Pendapatan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-25		
	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	240,000,000	247,427,500	103.09
Pendapatan Lain-Lain	0	735,190	-
Jumlah	240,000,000	248,162,690	103.40

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak *Semester II TA 2025* mengalami penurunan sebesar 127,75 % dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Menurunnya penjualan hasil pertanian di tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2025 dan 2024

Akun	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ Turun (%)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian	247,090,000	302,857,400	122.57
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	195,000	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	337,500	0	-
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	163,087	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370,000	13,800,000	3,729.73
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	365,190	0	-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
	Jumlah	248,162,690	###	127.75

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan hasil pertanian dan Penggunaan Sarana dan prasarana sesuai Tusi Rp 247.427.500,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:
 - a) Pendapatan dari Penjualan hasil pertanian Rp 247.090.000,00 berasal dari penjualan hasil samping dan benih ubi jalar.
 - b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp 337.500,00 berasal dari pendapatan sewa rumah dinas.
2. Pendapatan Lain-Lain senilai Rp 735.190,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:
 - a) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 370.000,00
 - b) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 365.190,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar **Rp 4.459.140.690,00** atau 98.89% dari anggaran belanja sebesar **Rp 4.509.042.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,698,672,000	1,698,274,129	99.98
Belanja Barang	2,810,370,000	2,760,866,561	98.24
Belanja Modal	0	0	-
Jumlah	4,509,042,000	4,459,140,690	98.89

Dibandingkan dengan Semester II TA 2024, Realisasi Belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,05%. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu pada belanja pegawai dikarenakan terdapat 5 cpns dan 13 PPPK di tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	1,698,274,129	1,163,858,410	45.92
Belanja Barang	2,760,866,561	2,997,098,895	(7.88)
Belanja Modal	0	83,700,000	(100.00)
Jumlah	4,459,140,690	4,244,657,305	5.05

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.698.274.129,00 dan Rp 1.163.858.410,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 45,92 % dari TA 2024 karena terdapat pengangkatan P3K dan CPNS di Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi pada Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	868,963,700	819,452,400	6.04
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,193	13,757	10.44
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	54,810,174	61,389,910	(10.72)
Belanja Tunjangan Anak PNS	15,424,014	13,803,528	11.74
Belanja Tunjangan Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	0.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48,270,000	38,820,000	24.34
Belanja Tunjangan PPh PNS	4,503,814	4,719,089	(4.56)
Belanja Tunjangan Beras PNS	46,131,540	43,503,140	6.04
Belanja Uang Makan PNS	172,006,000	111,314,000	54.52
Belanja Tunjangan Umum PNS	29,080,000	25,340,000	14.76
Belanja Gaji Pokok PPPK	303,890,833	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,828	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,940,388	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,801,949	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26,659,166	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	17,851,530	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	55,578,000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	-	-
Belanja Uang Lembur	18,595,000	37,943,000	(50.99)
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	1,698,274,129	1,163,858,824	45.92
Pengembalian Gaji Pokok PNS	-	414	(100.00)
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Pegawai Netto	1,698,274,129	1,163,859,238	45.92

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.760.866.561,00** dan **Rp 2.997.098.895,00**. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 mengalami Penurunan (7,88 %) dari Realisasi Belanja Barang 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya Pemotongan Anggaran dan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas. Selain itu terdapat dinamika perubahan organisasi dari BSIP menjadi BRMP yang berimplikasi pada blokir anggaran satker LRP Tanaman Aneka Umbi. Anggaran yang dapat digunakan hingga April 2025 hanya anggaran belanja 001 dan 002, sedangkan pembukaan blokir kegiatan teknis disetujui tanggal 30 April 2025.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1,150,642,560	1,240,718,000	(7)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,051,000	15,504,000	(35)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	84,824,000	76,516,000	10
Belanja Barang Operasional Lainnya	44,026,000	29,930,000	47
Belanja Bahan	159,789,000	75,000,000	113
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,200,000	246,000,000	(55)
Belanja Barang Persediaan	306,657,500	153,064,000	100
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
Belanja Langganan Listrik	191,037,787	200,785,361	(4)
Belanja Langganan Telepon	897,768	775,340	15
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51,948,030	43,949,180	18
Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	1,500,000	(33)
Belanja Jasa Konsultan	0	30,000,000	(100)
Belanja Jasa Profesi	13,500,000	24,500,000	(44)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72,700,000	108,270,000	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,822,000	348,242,000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	344,420,916	396,945,014	(13)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,950,000	5,400,000	213
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,400,000	0	
Jumlah Belanja Barang Bruto	2,760,866,561	2,997,098,895	(7)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	
Belanja Jasa Lainnya	0	0	
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	
Jumlah Belanja Barang Netto	2,760,866,561	2,997,098,895	(7)

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 83.700.000,00**. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 mengalami Penurunan (100,00 %) dari Realisasi Belanja Modal TA. 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja modal pada TA 2025 pada satker LRP Tanaman Aneka Umbi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	83,700,000	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Modal Bruto	0	83,700,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja Modal Netto	0	83,700,000	(100.00)

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Jumlah Belanja Modal Tanah Bruto	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja Modal Tanah Netto	0	0	

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 83.700.000,00**. Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 mengalami Penurunan (100,00 %) dari Realisasi Belanja Modal TA. 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja modal pada TA 2025 pada satker LRP Tanaman Aneka Umbi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-25	Naik/ (Turun) %
Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	0	83,700,000	(100.00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bruto	0	83,700,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto	0	83,700,000	(100.00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibanding TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester II TA 2025 dan 2024*

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bruto	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto	0	0	

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibanding TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Semester II TA 2025 dan 2024*

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, and Jaringan Bruto	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Netto	0	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp 393.502.108.832,00** dan **Rp 394.601.382.117,00**. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.099.273.285,00 atau 0,28%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	12.198.000	6.370.000
Aset Tetap	392.873.764.572	393.940.647.905
Properti Investasi	-	-
Piutang Jangka Panjang	-	-
Aset Lainnya	616.146.260	654.364.212
Jumlah	393.502.108.832	394.601.382.117

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp 12.198.000,00** dan **Rp 6.370.000,00**. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp 5.828.000,00** atau **91,49 %**, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	12.198.000	6.370.000
Jumlah	12.198.000	6.370.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening	0	0
Kuitansi UP belum di SPJ-kan	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Uang Tunai di Bendahara sudah nihil.

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan		0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi		0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan		0	0	0
4258	Pendapatan Denda		0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain		0	0	0
	Jumlah		0	0	0

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp 12.198.000,00** dan **Rp 6.370.000,00**.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	30 Juni 2024
Barang Konsumsi	12,198,000	6,370,000
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	12,198,000	6,370,000

Penjelasan peningkatan pada Persediaan dibandingkan tahun lalu merupakan penambahan pembelian ATK yang belum didistribusikan, semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp 392.873.764.572.00** dan **Rp 393.940.647.905.00**. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp 1.066.883.333.00** atau **0.27 %** apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	378.890.348.000	378.890.348.000	0
2	Peralatan dan Mesin	8.998.680.393	8.998.680.393	0
3	Gedung dan Bangunan	16.888.592.633	16.888.592.633	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.191.500.857	3.191.500.857	0
5	Aset Tetap Lainnya	55.472.000	55.472.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(15.150.829.311)	(14.083.945.978)	(1.066.883.333)
	Jumlah	392.873.764.572	393.940.647.905	(1.066.883.333)

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 378.890.348.000.00** dan **Rp 378.890.348.000.00**. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	378,890,348,000
Mutasi Tambah :	0
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2025	378,890,348,000

Tidak ada Mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanah.

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp 8.998.680.393.00** dan **Rp 8.998.680.393.00**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 Audited	8,998,680,393
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Non Revaluasi	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	8,998,680,393
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(8,188,518,190)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	810,162,203

Tidak terdapat kenaikan dan penurunan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Keuangan ini.

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp 16.888.592.633.00** dan **Rp 16.888.592.633.00**. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 Audited	16,888,592,633
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	16,888,592,633
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5,020,203,264)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11,868,389,369

Tidak terdapat kenaikan dan penurunan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang disajikan pada Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 3.191.500.857.00** dan **Rp 3.191.500.857.00**. Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi. dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 Audited	3,191,500,857
Mutasi tambah:	
Pembangunan Irigasi	0
Pembangunan Jaringan	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	3,191,500,857
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1,942,107,857)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,249,393,000

Tidak terdapat kenaikan dan penurunan nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan pada Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing **Rp -15.150.829.311.00** dan **Rp -14.083.945.978.00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buk
1	Peralatan dan Mesin	8,998,680,393	8,188,518,190	810,162
2	Gedung dan Bangunan	16,888,592,633	5,020,203,264	11,868,389
3	Jalan dan Jembatan	1,005,689,857	1,005,689,857	
4	Irigasi	1,906,251,000	873,167,099	1,033,083
5	Jaringan	279,560,000	63,250,901	216,309
Jumlah		29,078,773,883	15,150,829,311	13,927,944

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0.00 dan Rp. 0.00. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang jangka panjang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0.00 dan Rp 0.00.

ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. ATB berupa *Software*. Mutasi transaksi ATB adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

C.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran). namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
Jumlah	0	0

C.16 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp 937.975.000.00** dan **Rp937.975.000.00**. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan. karena berada dalam kondisi rusak berat. Mutasi transaksi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 Audited	937.975.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2025	937.975.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-321.828.740
Nilai Buku per 31 Desember 2025	616.146.260

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan. akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp -321.828.740.00 dan Rp -283.610.788.00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Hak Cipta	0	0	0
Aset Lain-lain			
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	(283,610,788)	(38,217,952)	(321,828,740)
Jumlah	(283,610,788)	(38,217,952)	(321,828,740)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
4	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp .00 dan Rp 0.00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 Tidak

mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024..

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp 0.00** dan **Rp 0.00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah Utang kpd Pihak Ketiga	-	-

C.19 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp 0.00** dan **Rp 0.00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP yang Belum di SPJ-kan	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 393.502.108.832.00** dan **Rp 394.601.382.117.00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah. kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	247.427.500	303.215.487
Beban Operasional	5.805.503.975	5.675.770.804
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	-5.558.076.475	-5.372.555.318

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional. seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp 247.247.500.00** dan **Rp 303.215.487.00**. Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp 55.787.987.00** atau **18,40%** apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2024.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan PNBP Semester II TA 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp 247.247.500.00** dan **Rp 303.215.487.00**. Pendapatan PNBP tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan PNBP Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	247,090,000	302,857,400	(18.41)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	195,000	(100.00)
Pendapatan Penggunaan sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	337,500	0	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	163,087	(100.00)
Jumlah	247,427,500	303,215,487	(18.40)

Pendapatan PNPB Semester II TA 2025 mengalami (penurunan) sebesar (18,40%). Hal ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan.

Perbandingan realisasi Pendapatan di LRA dengan nilai Pendapatan di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	247.090000	247.090000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	337.500	337.500	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370.000	0	370.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	365.190	0	365.190
Jumlah	248.162.690	247.427.500	735.190

Selisih realisasi pendapatan di LRA dan Pendapatan di LO senilai Rp. 735.190 merupakan pendapatan non operasional yaitu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL berupa tunjangan Umum Pegawai senilai Rp. 370.000 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berupa Kelebihan Pembayaran Internet senilai Rp. 365.190.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp 5.805.503.975.00** dan **Rp 5.675.770.805.00**. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp 129.733.170.00** atau **2,29%** apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 31 Desember 2024.

D.2 Beban Pegawai

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.698.274.129.00** dan **Rp. 1.163.858.410.00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	868,963,700	819,452,400	6.04
Beban Pembulatan Gaji PNS	15,193	13,757	10.44
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,810,174	61,389,910	(10.72)
Beban Tunj. Anak PNS	15,424,014	13,803,528	11.74
Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	0.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	48,270,000	38,820,000	24.34
Beban Tunj. PPh PNS	4,503,814	4,719,089	(4.56)
Beban Tunj. Beras PNS	46,131,540	43,503,140	6.04
Beban Uang Makan PNS	172,006,000	111,314,000	54.52
Beban Tunjangan Umum PNS	29,080,000	25,340,000	14.76
Beban Gaji Pokok PPPK	303,890,833		-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,828		-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,940,388		-
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,801,949		-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	26,659,166		-
Beban Tunjangan Beras PPPK	17,851,530		-
Beban Uang Makan PPPK	55,578,000		-
Beban Tunjangan Umum PPPK	10,185,000		-
Beban Uang Lembur	18,595,000	37,943,000	
Jumlah Beban Pegawai	1,698,274,129	1,163,858,824	45.92
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-414	(100.00)
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Jumlah Pengembalian	-	(414)	(100.00)
Jumlah Beban Pegawai	1,698,274,129	1,163,858,410	45.92

Beban Pegawai Semester II TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 45,92%. Hal ini disebabkan oleh adanya Pegawai PPPK dan CPNS di tahun 2025 serta kenaikan gaji pegawai.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Beban Pegawai LO	Belanja Pegawai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	868,963,700	868,963,700	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	15,193	15,193	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,810,174	54,810,174	-
Beban Tunj. Anak PNS	15,424,014	15,424,014	-
Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	48,270,000	48,270,000	-
Beban Tunj. PPh PNS	4,503,814	4,503,814	-
Beban Tunj. Beras PNS	46,131,540	46,131,540	-
Beban Uang Makan PNS	172,006,000	172,006,000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	29,080,000	29,080,000	-
Beban Gaji Pokok PPPK	303,890,833	303,890,833	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,828	7,828	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,940,388	13,940,388	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,801,949	4,801,949	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	26,659,166	26,659,166	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	17,851,530	17,851,530	-
Beban Uang Makan PPPK	55,578,000	55,578,000	-
Beban Tunjangan Umum PPPK	10,185,000	10,185,000	-
Beban Uang Lembur	18,595,000	18,595,000	-
Jumlah Beban Pegawai	1,698,274,129	1,698,274,129	-

Berdasarkan tabel di atas, selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp0.00.

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	0
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Piutang	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 300.829.500.00** dan **Rp 150.486.500.00**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	300,829,500	150,486,500	99.90
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	300,829,500	150,486,500	99.90

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beban Persediaan Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 99,90%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu barang persediaan pada kegiatan koordinasi kegiatan strategis kementan.

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Beban Persediaan LO	Belanja Persediaan LRA	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	300,829,500	306,657,500	(5,828,000)
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	300,829,500	306,657,500	(5,828,000)

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar (Rp 5.828.000.00). Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	12.198.000
Saldo awal	6.370.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jumlah	5.828.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.816.916.145.00 dan Rp 1.985.177.881.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1,150,642,560	1,240,718,000	(7)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,051,000	15,504,000	(35)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	84,824,000	76,516,000	10
Belanja Barang Operasional Lainnya	44,026,000	29,930,000	47
Belanja Bahan	159,789,000	75,000,000	113
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,200,000	246,000,000	(55)
Belanja Langganan Listrik	191,037,787	200,785,361	(4)
Belanja Langganan Telepon	897,768	775,340	15
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51,948,030	43,949,180	18
Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	1,500,000	(33)
Belanja Jasa Konsultan	0	30,000,000	(100)
Belanja Jasa Profesi	13,500,000	24,500,000	(44)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1,816,916,145	1,985,177,881	(8)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satker	0	0	
Jumlah Pengembalian	0	0	
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1,816,916,145	1,985,177,881	(8)

Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 8,49%. Efisiensi Anggaran

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Beban Barang dan Jasa LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Selisih
Belanja Keperluan Perkantoran	1,150,642,560	1,150,642,560	-
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,051,000	10,051,000	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	84,824,000	84,824,000	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	44,026,000	44,026,000	-
Belanja Bahan	159,789,000	159,789,000	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,200,000	109,200,000	-
Belanja Langganan Listrik	191,037,787	191,037,787	-
Belanja Langganan Telepon	897,768	897,768	-
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51,948,030	51,948,030	-
Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	1,000,000	-
Belanja Jasa Konsultan	0	0	-
Belanja Jasa Profesi	13,500,000	13,500,000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1,816,916,145	1,816,916,145	-
Pengembalian Beban Honor Operasional Satker	0	0	-
Jumlah Pengembalian	0	0	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1,816,916,145	1,816,916,145	-

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp0.00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	0
Revisi SPM SP2D/Belanja	0

Piutang	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(150.010)
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	364.362
Jumlah	214.352

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 264.522.000.00** dan **Rp 456.512.000.00**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72,700,000	108,270,000	(32.85)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,822,000	348,242,000	(44.92)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	264,522,000	456,512,000	(42.06)

Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar sebesar 42,06%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya efisiensi anggaran belanja pemeliharaan.

Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Beban di Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Beban Pemeliharaan LO	Belanja Pemeliharaan LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72,700,000	72,700,000	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,822,000	191,822,000	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	
Jumlah Beban Pemeliharaan	264,522,000	264,522,000	

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	0
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 372.770.916.00** dan **Rp 402.345.014.00**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 7,35 %. Hal ini disebabkan oleh adanya Penyesuaian Perjalanan Dinas yang mengacu sistem *At Cost* dan terbatasnya anggaran dikarenakan Penghematan Perjalanan Dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	344,420,916	396,945,014	-13.23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,950,000	5,400,000	213.89
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,400,000	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	372,770,916	402,345,014	-7.35

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp 0.00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih kecil sebesar Rp0.00. Selisih tersebut adalah:

Uraian	Beban Perjalanan Dinas LO	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Biasa	344,420,916	344,420,916	-
Pengembalian	16,950,000	16,950,000	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,400,000	11,400,000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Pengembalian	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	372,770,916	372,770,916	-

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	0

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Piutang	0
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Jumlah	0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.105.101.285.00** dan **Rp 1.213.921.600.00**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	379,896,163	442,185,084	(14.09)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	582,589,400	606,216,167	(3.90)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	22,904,625	(100.00)
Beban Penyusutan Irigasi	94,951,902	94,951,902	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	9,445,868	9,445,868	0.00
Jumlah Penyusutan	1,066,883,333	1,175,703,646	(9.26)
Beban Amortisasi Hak cipta	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	38,217,952	38,217,954	(0.00)
Jumlah Amortisasi	38,217,952	38,217,954	(0.00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,105,101,285	1,213,921,600	(8.96)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar (8.96%). Hal ini disebabkan oleh berkurangnya nilai sesuai masa manfaatnya.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp0.00** dan **Rp0.00**. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar **Rp0.00** atau **0.00%** apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	247.825.190	316.657.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	247.825.190	316.657,400

D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 261.001.244.00** dan **Rp 346.104.552.00**. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	370,000	13,800,000	(97.32)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	365,190	0	
Penerimaan Kembali Modal Barang TAYL	0	0	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	247,090,000	302,857,400	(18.41)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	247,825,190	316,657,400	(21.74)

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D.10 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 247.825.190.00 dan Rp 316.657.400.00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp 68.832.210.00) atau 21,73% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

D.10.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 247,825,190.00 dan Rp 316.657.400.00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp 68.832.210.00) atau 21,73% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian			31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	370.000	13.800.000	(97,32)
			Belanja Barang	365.190	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/ TGR Pensiunan PNS	0	0	0
2	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	247.090.000	302.857.400	(18,41)
		Jumlah		230.651.254	552.779.804	(21,74)

D.10.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp 0.00 atau 0.00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian			31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/ Usang	0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No .	Uraian			31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
			Jumlah	0	0	0

D.11 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp. 5,310,251,285.00) dan (5,055,897,918.00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 394,601,382,117.00** dan **Rp 395,729,026,217.00**.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp (5,310,251,285.00)** dan **(Rp 5,055,897,918.00)**. Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar **Rp 0.00** dan **Rp 0.00**.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp0.00** dan **Rp0.00**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp0.00** dan **Rp0.00**.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar **Rp0.00** dan koreksi kurang sebesar **Rp0.00** dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Uraian	Nilai (Rp)
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan Lainnya	0
7	Beban Persediaan konsumsi	0
8	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
9	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 1 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0.00** dan Rp0.00. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset lainnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan Lainnya	0
13	Persediaan yang Belum Diregister	0
14	Tanah	0
15	Peralatan dan Mesin	0
16	Gedung dan Bangunan	0
17	Jalan dan Jembatan	0
18	Irigasi	0
19	Jaringan	0
20	Aset Tetap Renovasi	0
21	Konstruksi Dalam pengerjaan	0

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Uraian	Nilai (Rp)
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
23	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Tanah	0
15	Peralatan dan Mesin	0
16	Gedung dan Bangunan	0
17	Jaringan	0
18	Aset Tetap Renovasi	0
19	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
21	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
22	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
23	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp 0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II TA 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
13	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
14	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
15	Software	0
16	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
17	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
18	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Akumulasi Amortisasi Software	0
20	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
21	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
22	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
23	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
24	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
25	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
23	Belanja	0
24	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
26	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp0.00** dan Rp0.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	0
16	Beban Bahan	0
17	Beban Jasa Profesi	0
18	Beban Persediaan Lainnya	0
19	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,210,978,000.00 dan Rp 3,928,253,818.00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Semester II TA 2025

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Diterima dari Entitas Lain	-317,015,487	-141,342,607
Ditagikan ke Entitas Lain	4,459,140,690	4,244,657,305
Transfer Masuk	0	0
Transfer Keluar	0	0
Jumlah	4,142,125,203	4,103,314,698

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. DDEL sebesar (Rp317.015.487.00) sedangkan DKEL sebesar Rp 4.459.140.690.00.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 sedangkan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 393.502.108.832.00 dan Rp 394.601.382.117.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian-kejadian setelah Tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025
1	650176487021000	BPG 057 LOKA PPTAU	0
2	1436974095	RPL LPSI TANAMAN ANEKA UMBI	0

Rekening Bendahara Pengeluaran Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Surat Izin No persetujuan dari KPPN Nomor: 000103/057 tanggal 25 Juni 2021 dan Rekening Pemerintah Lainnya Pada PT. Bank Negara Indonesia sesuai surat Persetujuan No. 000130/057 Tanggal. 18 Juli 2022.

2. Perubahan Nomenklatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian. Susunan Organisasi Kementerian Pertanian mengalami Perubahan Nomenklatur. Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan **semula** Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi **menjadi** Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.

3. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi¹ menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka umbi;
3. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka umbi;
4. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi;
5. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka umbi dan penilaian kesesuaian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian.

¹